

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA SEKTOR PERTAMBANGAN

Anggi Syuhada

Universitas Sriwijaya
anggi.syuhada@gmail.com

Yusnaini Yusnaini

Universitas Sriwijaya
yusnaini@fe.unsri.ac.id

Eka Meirawati

Universitas Sriwijaya
ekameirawati@fe.unsri.ac.id

ABSTRACT

This study aimed at testing and finding the influence of good corporate governance and profitability to tax avoidance. This study used secondary data from financial and annual report of mining companies registered in Bursa Efek Indonesia 2013 - 2017. Purposive sampling method was used in this study. Total sample were 55 from eleven companies. Analysis methods applied in this study were both descriptive analysis and statistical analysis technique. The result showed that good corporate governance which was represented by the institutional possession, independent commissioner council, and audit committee was not significantly influenced to the tax avoidance. Meanwhile profitability was found influenced to the tax avoidance negatively.

Keywords: *good corporate governance, institutional possession, independent commissioner council, audit committee, profitability, ROA, tax avoidance.*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini semua sektor mengalami perubahan yang membawa pengaruh kepada aktivitas didalam sektor itu termasuk sektor ekonomi. Perubahan tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya dan memperbaiki segala sistem kerja yang mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik atau yang dalam istilah asingnya disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Winata (2014) *corporate governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders*.

Indonesia mulai menerapkan GCG sejak penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002 dalam Wibisono, 2014). Sejalan dengan hal tersebut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan ditingkat Internasional.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yaitu Rp 1.618,1 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun dalam

APBN 2018 (Kemenkeu, 2018). Besarnya peran pajak bagi kesejahteraan negara dan rakyatnya mendorong pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Berbanding terbalik dengan pemerintah yang mengharapkan sumber pendapatan pajak semakin besar, perusahaan justru selalu berupaya mengurangi biaya-biaya usaha termasuk beban pajak. Baik masyarakat sipil maupun perusahaan, cenderung untuk menghindari biaya pajak yang besar atau berupaya mengecilkan jumlahnya dengan berbagai cara. Namun, perusahaan akan lebih cenderung mengupayakan agar beban pajak perusahaannya berkurang. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak / *tax avoidance*.

Fenomena *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia pernah terjadi pada perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia. Ketiga perusahaan ini terindikasi penghindaran pajak senilai Rp 2,176 triliun. Menurut laporan Ditjen Pajak ditemukan dugaan kurang bayar pajak pada 2007 oleh tiga perusahaan tersebut masing-masing Rp 1,5 triliun untuk Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar untuk Bumi Resources dan US\$ 27,5 juta atau setara Rp 300 miliar untuk Arutmin (<https://www.beritasatu.com>).

Berdasarkan berita online pada tahun 2016 data pajak yang disampaikan oleh Koordinator Sumber Daya Alam (SDA), perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan rata-rata menghindari pajak atau mengemplang pajak. Dari data 11.000 izin tambang ada 4000 yang non *clean and clear*, izin tumpang tindih dan sebagian besar tidak membayar pajak (www.klinikpajak.co.id).

Setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia merupakan wajib pajak

sehingga kenyataannya adalah bahwa suatu aturan struktur GCG mempengaruhi cara perusahaan itu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun demikian Friese (2006) menyatakan bahwa pajak juga bergantung pada permainan GCG dalam suatu perusahaan. Banyaknya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa GCG belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Mekanisme GCG salah satunya ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Di Indonesia, sektor pertambangan adalah sektor yang berada di deretan teratas penyumbang investor dan pendapatan negara. Didukung oleh geologis Indonesia yang di dalam buminya terdapat banyak sumber daya alam yang bisa menjadi sumber penghasilan yang besar bagi perusahaan. Akibat dari penghasilan yang besar disertai dengan regulasi pemerintah untuk sektor ini yang masih tumpang-tindih, sangat memungkinkan terjadinya kecurangan didalam tata kelola perusahaan, termasuk dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*).

LANDASAN TEORI

Signaling Theory (Teori Sinyal)

Signaling theory atau teori sinyal merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas

perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan (Gumanti & Jember, 2018).

Martono (2007) dalam Chorilayah (2016) menyebutkan bahwa *signaling theory* adalah teori yang melihat pada tanda-tanda tentang kondisi yang menggambarkan suatu perusahaan. Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar dapat diharapkan membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan berkualitas buruk. Agar sinyal tersebut baik, maka harus dapat ditangkap pasar dengan dipresepikan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang memiliki kualitas yang buruk.

Dengan demikian teori sinyal menekankan akan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak eksternal perusahaan. Hal ini karena informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Informasi tersebut dapat berupa informasi akuntansi dan informasi non-akuntansi. Dalam hal ini investor memerlukan informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sehingga dapat memberikan kontribusi langsung di dalam menentukan berbagai tindakan yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan jadi investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah.

Definisi Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. GCG berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan

yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Nuryan (2016) mengartikan GCG atau tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, *Corporate governance* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Arista, Silvia, Wahyudi, Yusnaini, 2018).

Mekanisme Good Corporate Governance

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Yulistian, 2018). Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam

organisasi lebih tinggi (Diantari & Ulupui, 2016).

Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen didefinisikan sebagai anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan, serta memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal, dan UU serta peraturan terkait (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012).

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (2004) Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30% dari jumlah seluruh anggotakomisaris.

Komite Audit

Komite audit sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui (BEJ, 2000) menyatakan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian

yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Struktur komite audit berdasarkan pasal 4 yaitu mempunyai anggota paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit berperan sebagai jembatan antara auditor eksternal dengan auditor internal, sehingga komite audit harus bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, baik dari dewan direksi maupun dengan auditor eksternal dan internal dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Profitabilitas

Menurut Syafri (2008) dalam Pontoh (2016) rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.

Penelitian ini memfokuskan pada *return on assets* (ROA), karena ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan.

Tax Avoidance

Menurut Suandy (2011) dalam Dwiatmanto (2015) *tax avoidance* adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di

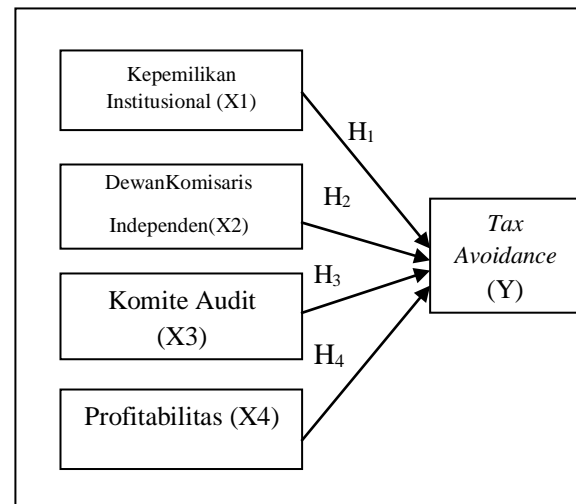
bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Menurut Dyreng (2010) variabel *tax avoidance* ini dihitung melalui CETR (*cash effective tax rate*) perusahaan, yaitu kas yang dikeluarkan untuk biayapajak dibagi laba sebelum pajak. CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan.

Hipotesis Penelitian

- H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- H2: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- H4: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah yang mencadangkan suatu realitas dapat diklasifikasikan, konkret, teramati, dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat, dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan data sekunder. Pada penelitian ini, penulis memilih perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan tahun 2013 – 2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan data yang dapat diperoleh melalui akses situs www.idx.co.id, objek penelitian ini berfokus pada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (calk), serta data terkait kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan tersebut dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017.

Populasi dan Sampel Penelitian Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 – 2017. Jumlah populasi adalah sebanyak 41 perusahaan.

Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*purposive sampling*). Metode *purposive* merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki.

Kriteria pertimbangan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2013 –2017.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan tahunan selama tahun 2013 –2017.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu tahun 2013–2017.
4. Perusahaan menyajikan informasi terkait kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit dan informasi perpajakan dalam laporan tahunannya.

Tabel 1.
Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama 2013 – 2017	41
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama 2013 - 2017 secara lengkap	(7)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu tahun 2013 – 2017	(22)
4.	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian	(0)
	Jumlah sampel	11
	Periode penelitian	5
	Jumlah observasi pengamatan	55

Sumber : idx.co.id

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan perusahaan oleh pihak institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri serta institusi lainnya.

b. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki tugas sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan strategis dalam perusahaan serta memberi nasehat kepada dewan direksi.

c. Komite Audit

Keberadaan komite audit merupakan salah satu kriteria penerapan *good corporate governance*. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

d. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola

kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. ROA merupakan perbandingan laba bersih dengan jumlah aktiva perusahaan.

e. Variabel Dependen Tax Avoidance

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* yang dinyatakan dengan notasi Y. Semakin besar Cash ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum.

2. Uji Asumsi Klasik

Normalitas data dapat dilihat dengan pendekatan *Kolmogorov Smirnov* (K-S) dengan signifikan > 0,05. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat diketahui dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik plot. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya dengan Uji Durbin-Watson (DW test).

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Analisis tersebut digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi berguna untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016).

Rumus regresi linear berganda:

$$TA = a + b_1KI + b_2DKI + b_3KA + b_4P$$

Dimana:

TA : *Tax Avoidance*

- a : Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
- b₁ : Koefisien regresi kepemilikan institusional
- KI : Kepemilikan institusional
- b₂ : Koefisien regresi dewan komisaris independen
- DKI : Dewan komisaris independen
- b₃ : Koefisien regresi komite audit
- KA : Komite audit
- b₄ : Koefisien regresi profitabilitas
- P : Profitabilitas
- E : standar error

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$).

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

	Valid	kepemilikan institusional	sqrt_dki	komite audit	sqrt_prof	tax avoidan ce
N	55	55	55	55	55	55
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	.33056	.6412	.6454	.2642	.32782	
Std. Deviation	.1818	.0797	.1102	.1243	.1322	
Minimum	.0010	.53	.3333	.01	.0056	
Maximum	.7448	.87	.7500	.63	.7486	

Sumber : Output SPSS

Tabel 2 menggambarkan statistik deskriptif untuk variabel dependen *tax avoidance* dengan variabel independen *good corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit dan juga profitabilitas.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa variabel dependen *tax avoidance* mempunyai rata-rata 0.327820 atau 32,782%. Nilai terbesar adalah 0.7486 atau 74,86% dan nilai terendah 0.056 atau 5,6% dengan standar deviasi 0.1322381 atau 13,22%. Data ini merupakan besar kecilnya taksiran penghindaraan pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia cenderung patuh dalam membayar beban pajaknya.

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0010 atau 0,1% dan nilai maksimum sebesar 0,7448 atau 74,48% dengan nilai standar deviasi yaitu 0.1818688 atau 18,18% dan nilai rata-rata 0,330564 atau 33,05%. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia sangat besar dikuasai oleh institusi lain, bisa dilihat dari nilai maksimum 74,48% meskipun nilai minimum menunjukkan 0,1%.

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel dewan komisaris independen menunjukkan nilai minimum sebesar 0,53 atau 53% dan nilai maksimum sebesar 0,87 atau 87%. Standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 0,7977 atau 79,77% dan nilai rata-rata sebesar 0,6412 atau 64,12%. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia telah memenuhi aturan yang telah ada (Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004, yaitu perusahaan harus mempunyai dewan komisaris independen sebesar minimal 30%). Hal

ini menunjukkan hal yang sangat positif.

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel komite audit menunjukkan nilai minimum sebesar 0,3333 atau 33,33% dan nilai maksimum sebesar 0,7500 atau 75%. Standar deviasi yang didapat adalah sebesar 0,1102158 atau 11,02% dengan nilai rata-rata sebesar 0,645475 atau 64,54%. Hal ini menunjukkan perusahaan pertambangan di Indonesia cenderung patuh melaksanakan peraturan Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep- 29/PM/2004 peraturan No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman 55 Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang menyatakan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya atau dengan kata lain minimal berjumlah 3 orang.

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01 atau 1% dan nilai maksimum sebesar 0,63 atau 63% dengan standar deviasi sebesar 0,12433 atau 12,43% dan nilai rata-rata sebesar 0,2642 atau 26,42%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya, laba bersih yang diperoleh sebesar 26,42%.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* diatas menunjukkan bahwa nilai *P-Value* yang tercantum dalam *Asymp.Sig (2-tailed)* adalah sebesar 0,071. Nilai sig (p) > 0,05 artinya data residual berdistribusi normal.

Melalui tabel uji multikolinieritas dapat dilihat bahwa, *tolerance* variabel bebas > 0,10 dan VIF variabel bebas < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak saling berkorelasi secara signifikan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data yang dianalisis memenuhi asumsi multikolinieritas.

Dari grafik *scatterplot* tersebut, dapat diketahui bahwa data yang tersebar tidak membentuk pola tertentu yang jelas, titik data menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan besarnya nilai *Durbin Watson* sebesar 2.146, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikansi 5% dengan jumlah sampel 55 (N) dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka dari tabel didapatkan nilai *dL* sebesar 1,4136 dan *dU* sebesar 1,7240. Nilai DW yang berada pada daerah $du < dw < 4 - du$ dinyatakan model regresi terbebas dari autokorelasi dan layak digunakan. Dalam penelitian ini, nilai *Durbin Watson* harus berada diantara 1,7240 (*dU*) dan 2,276 ($4 - dU$). Hasil analisis menunjukkan nilai *Durbin Watson* adalah 2,146 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis Uji parsial

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan besarnya angka *t* penelitian dengan *t* tabel maupun dengan melihat nilai koefisien sig. seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.580	.182		3.181	.003
kepemilikan institusional	-.004	.111	-.006	-.039	.969
sqrt_dki	-.062	.215	-.037	-.289	.774
komite audit	-.139	.179	-.116	-.773	.443
sqrt_prof	-.460	.137	-.433	-3.360	.001

a. Dependent Variable: taxavoidance

Uji parsial pengaruh kepemilikan institusional terhadap Tax Avoidance

Variabel kepemilikan institusional (X1) memiliki nilai *t* sebesar -0,039 dengan tingkat signifikansi 0,969 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima.

Uji parsial pengaruh dewan komisaris independen terhadap Tax Avoidance

Variabel dewan komisaris independen (X2) memiliki nilai *t* sebesar -0.289 dengan tingkat signifikansi 0,774 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima.

Uji parsial pengaruh komite audit terhadap Tax Avoidance

Variabel komite audit (X3) memiliki nilai *t* sebesar -0.773 dengan tingkat signifikansi 0.443 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa komite audit terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima.

Uji parsial pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Variabel profitabilitas (X4) memiliki nilai t sebesar -3.360 dengan tingkat signifikansi 0.001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance* dapat diterima.

Uji Koefisien Deterinasi (R²)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.447 ^a	.200	.136	.1229523

a. Predictors: (Constant), kepemilikan institusional, sqrt_x4, sqrt_x2, komite audit

Sumber: Output SPSS

Hasil pengujian berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari adjusted R² sebesar 0,136 atau 13,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebesar 13,6% *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas, sedangkan 86,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan perhitungan uji t dalam tabel *coefficients* menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0,039 dengan nilai signifikansi 0,969 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* memiliki arti bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peranan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri.

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu Winata (2014) dan Diantari (2016) yang menyimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun tidak mendukung hasil penelitian Ariawan (2017) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya.

Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan perhitungan uji t dalam tabel *coefficients* menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0,289 dengan nilai signifikansi 0,774 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan hanya sebagai pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi peraturan dengan baik. Tetapi dewan komisaris independen tidak boleh turut serta dalam

mengambil keputusan operasional perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu Alifianti (2017) dan Okrayanti (2017) yang juga menyimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun tidak mendukung hasil penelitian terdahulu lainnya yaitu Diantari (2017) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan perhitungan uji t dalam tabel *coefficients* menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0,773 dengan nilai signifikansi 0,443 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan yang baik dan cenderung netral, maka jumlah komite audit tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak melakukan (*tax avoidance*).

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu Sari (2018) dan Yulistian (2018) yang juga menyimpulkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun tidak mendukung hasil penelitian terdahulu lainnya yaitu Winata (2014) yang menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan perhitungan uji t dalam tabel *coefficients* menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -3,360 dengan nilai

signifikansi 0,001 lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin menekan tindakan *tax avoidance*. Slemrod (1998) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung akan melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung akan melakukan ketidakpatuhan pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al.2010).

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu Arianandini (2018) dan Suardana (2014) yang juga menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, namun tidak mendukung hasil penelitian terdahulu lainnya yaitu Dewinta (2016) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. *Good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran selain CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dalam mengukur *tax avoidance*. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan pengukuran *book tax gap* (BTG).
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan populasi perusahaan yang dijadikan sampel penelitian tidak hanya perusahaan sektor pertambangan saja tetapi juga jenis industri lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi tindakan *tax avoidance* seperti *leverage*, risiko perusahaan, manajemen laba, dan kompensasi rugi fiskal. Selain itu, dapat menambah proksi yang digunakan untuk *corporate governance* seperti kepemilikan manajerial, sekretaris perusahaan, dewan direksi, dan sebagainya agar kesimpulan atas hasil penelitian dapat digeneralisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. 2017. Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governanance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2), 1–11.
- Arianandini, P. W. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088–2116.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E- Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859.
- Arista, Silvia, Tertiarto Wahyudi dan Yusraini Yusraini. 2018. Pengaruh Struktur Corporate Governance Dan Audit Tenure Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Akuntabilitas*. Vol. 12 (2): 81-98.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2012. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- BEJ. 2000. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-415/BEJ/06/2000. Jakarta: BEJ.
- Choriliyah, S., & dkk. 2016. Reaksi Pasar Modal Terhadap Penurunan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Atas Saham Sektor Industri Transportasi Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic Education*, 5 (4), 1–10.
- Dewinta, I. A. R. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (3), 1584–1613.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16 (1), 702–732.
- Dwiatmanto. 2015. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan*, 6(3), 1–9.
- Dyreg, Scott, et Al. 2010. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *Social Science Research Network*.
- Friese, A., Link, S., Mayer, S., Planck, M., & Property, I. 2006. Taxation and Corporate Governance Working paper, 1–99.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis*

- Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gumanti, T. A., & Jember, U. 2018. Teori Sinyal Dalam Manajemen Keuangan, (December 2014).
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta. 2004. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta, 1–44.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 30. Retrieved from www.governance-indonesia.or.id
- Nuryan, I. 2016. Strategy Development And Implementation Of Good Corporate Governanace (GCG) On BUMN And BUMD In Indonesia. *Jurnal AdBispreneur*, 1(2), 145–152.
- Pontoh, N., Pelleng, F. A. ., & Mukuan, D.D. S. 2016. Analisis Profitabilitas Pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(4), 1–10.
- Suardana, K. A. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(9), 525–539.
- Wibisono, A. 2014. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2007-2011. *Business Accounting Review*, 2(1), 21–30.
- Winata, F. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Yulistian, A. 2018. Pengaruh Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *JOM FEB*, 1(1), 1–13.

